**PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA TERAS BARU KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2019**

# 1Merlin

1Program Studi Akuntansi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Email: mhemerlin@gmail.com

2Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta

# **ABSTRAK**

Akuntabilitas merupakan suatu pertangungjawaban pemerintah untuk melaporkan dan menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan agar pemerintah dapat transparan dengan komitmen yang telah terbentuk dalam pelaksanaannya. Pemerintah desa Teras Baru, kecamatan Tanjung Palas, kabupaten Bulungan adalah pemerintah desa yang mendukung adanya akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk menilai akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan Dana Desa di desa Teras Baru, kecamatan Tanjung Palas, kabupaten Bulungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbabis studi di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Hasil penelitian ini menunjukan pengelolaan keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Teras Baru sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa Teras Baru menggunakan media informasi digital, terdapat informasi yang disebar tiap-tiap dusun melalui ketua RT, selain itu juga terdapat papan informasi yang ditempatkan di Kantor Desa. Meskipun pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sangat baik, tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah.

**Kata kunci: Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah desa**

# **ABSTRACT**

Accountability is the government's responsibility to report and present activities that have been carried out to the public. This accountability is carried out so that the government can be transparent with the commitments that have been formed in its implementation. Teras Baru village government, Tanjung Palas sub-district, Bulungan district is a village government that supports accountability and transparency. This study aims to assess the accountability and transparency of the village government towards the management of Village Funds in Teras Baru village, Tanjung Palas sub-district, Bulungan district. This research uses qualitative methods after field studies. The data collection technique was done by triangulation (combined). The results of this study indicate that the Village Fund financial management implemented by the Teras Baru village government is in accordance with the prevailing laws and regulations. Transparency carried out by the Teras Baru village government uses digital information media, there is information that is disseminated by each hamlet through the RT head, besides that there is also an information board placed at the Village Office. Although the Village Fund management carried out by the village government is very good, the community's understanding of Village Fund policies is still low.

**Keywords: Village Fund Management, Village Government**

## **Latar Belakang**

Desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, Desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Namun, kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat. peran dari pemerintah daerah cukup vital dalam otonomi daerah dikarenakan desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah. Peran dari pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada Desa dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Desa diwajibkan untuk dapat mengelola dan mengatur urusannya sendiri.

Desa tidak hanya sekedar jadi obyek pembangunan tetapi sekarang menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan (Mondong 2013). Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun desa agar menjadi mandiri dan demokratis, sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan. Namun demikian, tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Dalam penelitiannya (Widagdo, Widodo, dan Ismail 2016) menyebutkan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Meskipun demikan, terdapat Badan Perwakilan Daerah (BPD) Tujuan dari BPD yaitu untuk mewakili masyarakat dan memiliki beberapa fungsi, yang salah satu fungsi yang harus dilakukan oleh BPD memberikan pengawasan kepada perangkat desa agar yang sudah ditargetkan oleh pemerintah dapat tercapai secara efektif dan efisien dan juga dalam pelaksanaan Dana Desa, pemerintah daerah wajib membina dalam pengelolaan Dana Desa

1. **Metode Penelitian**

# Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. (Kasiram 2008: 149).

1. **Pembahasan dan Penelitian**
2. pembahasan

 Desa Teras Baru berupa daratan yang berbukit-bukit, dataran rendah, sungai, dan rawah yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dalam arti luas. Iklim Desa Teras Baru sebagaimana desa-desa lain diwilayah sekitarnya mempunyai iklim tropis, dan berpengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Teras Baru. Desa terletak di dalam wilayah kecamatan Tanjung Palas kabupaten Bulungan provensi Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Desa.

1. Sebelah utara berbatasan dengan desa salimbatu
2. Sebelah timur berbatasan dengan desa teras nawang
3. Sebelah selatan berbatasan dengan desa pejalin dan desa pimping

 Penduduk Desa Teras Baru berasal dari berbagi daerah yang berbedah-beda ada yang berasal dari etnis Dayak Kenya dan etnis jawa,bugis, manado,toraja dan batak. Tradisi-tradisi musyawara untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah

 dilakukan oleh masyarakat sejak munculnya Desa Teras Baru. Hal itu secara efektif membuat benturan-benturan antara kelompok masyarakat terhindarkan

## Penelitian

Pada tahun 2019 ada beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di desa Teras Baru sesuai dengan daftar usulan rencana program kegiatan, alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) Teras Baru kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2019 dengan mengacu pada peraturan Bupati Bulungan nomor 04 tahun 2019 sebagai berikut:

## PENDAPATAN DESA TERAS BARU TAHUN ANGGARAN 2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | PENDAPATAN | NILAI |
| 1 | Pendapatan asli desa (BUMDES) | Rp26.000,000 |
| 2 | Dana desa  | Rp1.281,357,000 |
| 3 | Alokasih dana desa  | Rp851.283,000 |
| 4 | Penghasilan tetap aparat desa | Rp198.000,000 |
| 5 | Bunga bank 2018 | Rp7.291,153 |
| 6 | Silpa tahun anggaran 2018 | Rp54.026,873 |
|  | **TOTAL KESELURUHAN PENDAPATAN**  | **RP2.245.348,026** |

Sumber : Data sekunder, 2019

 Berdasarkan anggaran ADD untuk desa teras baru pada tahun anggaran 2019 yakni sebesar Rp 851.283,000 kemudian bantuan untuk tunjangan penghasilan tetap aparat pemerintah desa tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp198.000,000. Berikut disajikan laporan realisasi pelaksanaan APBdes Desa Teras Baru Tahun Anggaran 2019 :

1. **Kesimpulan Dan Saran**
2. Kesimpulan

Hasil dari penelitian Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Teras Baru yang dilakukan di Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh desa teras baru sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuanketentuan yang berlaku. Disamping itu proses pengelolaan keuangan Dana Desa melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pengawasan. Meskipun pengelolaan Dana Desa yang dilakukan sangat baik, tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah.
2. Pelaksanaan pertanggungjawaban Dana Desa oleh pemerintah desa secara teknis maupun administrasi sudah baik. Tetapi dalam hal laporan realisasi Dikarenakan belum adanya aturan spesifik yang membahas mengenai format yang seharusnya dilakukan.
3. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka dapat diberikan saran dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti lain yang ingin melakukan kajian ulang terhadap penelitian ini disarankan untuk memperluas sampel penelitian, hendaknya dengan membandingkan antar desa diluar wilayah Kabupaten Bulungan sehingga dapat meningkatkan generalisasi hasil penelitian.
2. Pemerintah Desa perlu melakukan sosialisasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui proses implementasi penggunaan Dana Desa. Sehingga usulan-usulan yang diberikan oleh masyarakat menjadi lebih terarah.

# DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

Abidin, Muhammad Zainul. 2015. Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis, vol. 6 Juni 2015, PP 61-76.*

Deri. 2017. “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan APBDes Di Desa Senambah Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur.” *e-Journal Ilmu Pemerintahan* 5(1): 121–32.

 Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*: *Analisis Data* (Edisi Kesa). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

 Fitra, Amanda Aidil. 2016. “Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penggunaan Dan Pelaporan Dana Desa (Kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul).” Universitas Gadjah Mada.

Kartika, Ayu, Putu Nomy Yasintha, Kadek Wiwin, and Dwi Wismayanti. 2018. “*Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016* (Studi Kasus : Desa Pemecutan Kaja , Kecamatan Denpasar Utara).” Jurnal Citizen 1(1).

Laksmi, dkk. 2008. *Manajemen Perkantoran Modern*. Jakarta: Penaku.

Madea, Yolanda, Alden Laloma, and Very Y. Londa. 2017. “Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud.” Jurnal Administrasi Publik 3(46)

Nugroho, Riant Dwijodijoto. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi,* Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Sumpeno, Wahjudin, 2011. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.TheWorld Bnak, Aceh.

Terry, George R. 2009. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara

\_\_\_\_\_\_.2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

\_\_\_\_\_\_.2005. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

\_\_\_\_\_\_.2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual.

\_\_\_\_\_\_.2011. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011.

\_\_\_\_\_\_.2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

\_\_\_\_\_\_.2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

\_\_\_\_\_\_.2014. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

\_\_\_\_\_\_.1999. UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

\_\_\_\_\_\_.2003. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

\_\_\_\_\_\_.2015. UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

\_\_\_\_\_\_.2014. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Utama, Made Suyana. 2008. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan asli Daerah dan Pengaruhnya terhadap Kinerja serta Kemandirian Keuangan Daerah. *Journal Fakultas Ekonomi Udayana.*